

**PENGARUH KOMITE AUDIT, AUDIT
INTERNAL, DAN AUDIT EKSTERNAL
TERHADAP MANAJEMEN LABA**
(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di
BEI Tahun 2010-2011)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

NURRAHMAN WAHID
NIM. C2C009141

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nurrahman Wahid

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009141

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KOMITE AUDIT, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2011)**

Dosen Pembimbing : Dr. Agus Purwanto, S.E.,M.Si.,Akt.

Semarang, 22 agustus 2013

Dosen Pembimbing,

(Dr. Agus Purwanto,S.E.,M.Si., Akt.)

NIP. 196808271992021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Nurrahman Wahid

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009141

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KOMITE AUDIT, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2011)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 9 September 2013

Tim Penguji:

1. Dr.H.Agus Purwanto,S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Dr.Indira Januarti,S.E.,M.Si.,Akt. (.....)
3. Dr.Endang Kiswara,S.E.,M.Si,Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nurrahman Wahid, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Komite Audit, Audit Internal dan Audit Eksternal terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2011)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 Agustus 2013

Yang membuat pernyataan,

Nurrahman Wahid

NIM: C2C009141

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komite audit, audit internal dan audit eksternal terhadap manajemen laba perusahaan. BAPEPAM mengeluarkan aturan kepada setiap perusahaan manufaktur untuk membentuk komite audit. Masalah keagenan dalam perusahaan akan terkontrol dengan adanya komite audit dan keberadaan audit internal. Selain itu juga didukung dengan audit eksternal oleh KAP yang mengeluarkan opini audit yang mampu dipercaya oleh *prinsipal* atau pemilik saham.

Sampel yang digunakan adalah data sekunder dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia pada tahun 2010-2011. Sampel diambil secara acak dari 41 perusahaan. Dua puluh sembilan perusahaan manufaktur ditetapkan sebagai sampel melalui perhitungan formula babbie. Variabel manajemen laba, komite audit, audit internal dan audit eksternal dianalisis menggunakan metode analisis Regresi Linear Berganda dengan pengujian hipotesis uji statistik t dan uji statistik F. Hal ini dikarenakan variabel yang diuji lebih dari satu variabel independen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit, komite audit independen berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan jumlah pertemuan komite audit, keberadaan audit internal, pertemuan audit internal dengan komite audit, dan ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel kontrol yaitu Total Aset dan ZFS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Variabel kontrol lainnya yaitu Leverage tidak berpengaruh signifikan.

Kata kunci: manajemen laba, jonnes modified, komite audit, audit internal, audit eksternal, masalah keagenan, perusahaan manufaktur.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the influence of audit committees , internal audit and external audit of the management of corporate profits . Securities and Exchange Commission issued rules to any manufacturing company to establish an audit committee . Agency problems within the company will be controlled by the audit committee and internal audit presence . It is also supported by an external audit by the accounting firm issued an audit opinion which is able to be trusted by the principal or shareholder .

The sample used is secondary data from the Indonesia Stock Exchange (BEI) is a manufacturing company's annual report and chemical industry base in 2010-2011 . Samples were taken at random from the 41 companies . Twenty- nine manufacturing companies as samples determined through calculation formula Babbie . Variable earnings management , audit committee , internal audit and external audit analyzed using multiple linear regression analysis method to test hypothesis testing and statistical test statistic t F. This is because the variables are tested more than one independent variable .

These results indicate that the variable size of the audit committee , the audit committee independent significant negative effect on earnings management . While the number of audit committee meetings , the existence of an internal audit , internal audit meeting with the audit committee , and the size of KAP had no significant effect . The study also found that the control variables : Total Assets and ZFS significantly and negatively related to earnings management . Leverage lainnnya control variables that had no significant effect .

Keywords: earnings management, Jonnes modified, audit committee, internal audit, external audit, the agency problem, the company manufactures.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ My Life My Rule”

“ Creative is the Best Thing”

“Do for Something”

PERSEMBAHAN

Buah karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tua saya (bapak dan ibu) tercinta

Adik-Adik

Semua Keluarga

Semua orang yang kusayangi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH KOMITE AUDIT, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2011)”**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan sepuh hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. H. Muhammad Syafrudin, S.E M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi yang telah memberikan arahan selama masa studi.
3. Dr. Agus Purwanto, S.E.,M.Si.,Akt. selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan.
4. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D. selaku dosen wali atas arahan dan nasihat selama proses studi.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas ilmu bermanfaat yang telah diajarkan.
6. Seluruh staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas semua bantuan yang telah diberikan.
7. Ibu Diana, Bapak Kastolani, Adik Muna, Adik Rizal dan Eyang Suwarni atas doa, kasih sayang, perhatian, dukungan, motivasi dan semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
8. Spesial untuk Yuko Sekar Saraswati yang selalu memberikan perhatian, doa dan dukungan yang begitu besar dengan segala kesabarannya.
9. Sahabat-sahabatku Group for Nothing Faizal, Pinto, Yoga, Husni, Alek , Yuko, Festi, Asa, Kiki dan Yura serta sahabat-sahabatku D’Como, Saiful, Yoshua, Agus, Dian yang telah memberikan semangat dan dukungannya.

10. Teman-temanku Lala, Idut, Mareta, Angga, Era, Gea, Tika, Candra, Siddik, Dhita, Dini, Deri, Dirga, Duma, Duta, Agil, Andrian, Mindo, Fahry atas dukungan yang diberikan kepada penulis.
11. Teman-teman Akuntansi angkatan 2009 terima kasih atas kekeluargaannya selama ini.
12. Teman-teman KKN Desa Madyogondo, Januar, Malik, Tito, Dimas, Anin, Uti, Makna, nova, Grace terima kasih atas kekeluargaan dan dukungan yang diberikan.
13. Semua Pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga penelitian ini berguna bagi pihak pembaca.

Semarang, 22 Agustus 2013

Penulis

Nurrahman Wahid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Keagenan	13
2.1.2 Undang-Undang Sarbanes Oxley.....	16
2.1.3 Undang-Undang No 5 Tahun 2011	17
2.1.4 Good Corporate Governance	19
2.1.5 Komite Audit	21
2.1.5.1 Ukuran Komite Audit.....	29
2.1.5.2 Komite Audit Independen	29
2.1.5.3 Jumlah Rapat Komite Audit.....	31
2.1.6 Audit Internal	32
2.1.7 Audit Eksternal	34

2.1.7 Manajemen Laba.....	38
2.1.8 Faktor Lain yang Mempengaruhi Manajemen Laba.....	44
2.1.8.1 Jumlah Aset.....	42
2.1.8.2 Leverage.....	45
2.1.8.3 ZMIJEWSKI Financial Score (X-Score)	46
2.2 Penelitian Terdahulu.....	46
2.3 Kerangka Pemikiran	49
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	52
2.4.1 Hubungan Komite Audit dengan Manajemen Laba	52
2.4.2 Hubungan Audit Internal dengan Manajemen Laba.....	55
2.4.3 Hubungan Audit Eksternal dengan Manajemen Laba	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	58
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	58
a. Variabel Dependen	59
1. Manajemen Laba	60
b. Variabel Independen	62
1. Ukuran Komite Audit.....	62
2. Komite Audit Independen	63
3. Jumlah Rapat Komite Audit.....	64
4. Audit Internal	64
5. Pertemuan Audit Internal dengan Komite Audit.....	65
6. Ukuran KAP.....	65
c. Variabel Kontrol.....	66
1. Jumlah Aset.....	66
2. Leverage	67
3. ZMIJEWSKI FINANCIAL SCORE (X-Score)	68
3.2 Populasi dan Sampel.....	68
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	69
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	70
3.5 Metode Analisis Data	70
3.5.1 Analisis Deskriptif	70

3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	70
3.5.3 Analisis Regresi Berganda.....	74
3.6 Pengujian Hipotesis	75
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	78
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	78
4.2 Hasil Analisis Data	79
4.2.1 Statistik Deskriptif	79
4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik.....	84
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda	88
4.2.3.1 Uji Model.....	89
4.2.3.2 Pengujian Hipotesis	90
4.2.3.3 Koefisien Determinasi	93
4.3 Pembahasan	95
4.3.1 Hipotesis	95
4.3.2 Variabel Kontrol	104
BAB V PENUTUP.....	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Keterbatasan	108
5.3 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	48
Tabel 3.1 Ukuran Variabel.....	58
Tabel 4.1 Analisis Deskriptif	79
Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Variabel Dummy	80
Tabel 4.3 Uji Normalitas Residual.....	84
Tabel 4.4 Pengujian Multikolonieritas dengan VIF.....	85
Tabel 4.5 Pengujian Heterokedastisitas	86
Tabel 4.6 Pengujian Autokorelasi	87
Tabel 4.7 Matriks Koefisien Korelasi	88
Tabel 4.8 Hasil Uji Model	90
Tabel 4.9 Ringkasan hasil Uji t.....	93
Tabel 4.10 Hasil Koefisien Determinasi	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	51
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Sampel Penelitian.....	116
Lampiran II Hasil Output SPSS	118
Uji Regresi Linier Berganda I.....	120
Uji Asumsi Klasik I.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun yang lalu, dunia menghadapi skandal korporasi dan manipulasi data yang menyebabkan runtuhnya perusahaan raksasa dunia seperti Enron dan WorldCom. Perusahaan ini dinyatakan bangkrut oleh pengadilan karena adanya kegiatan manipulasi akuntansi. Hal yang mengherankan adalah keikutsertaan KAP ternama dunia yaitu Arthur Andersen sebagai auditor sekaligus konsultan dalam skandal ini (Goodman, 2012).

Menurut Goodman (2012) KAP ini penuh dengan kecurangan, penyamaran data dan pelanggaran etika profesi akuntansi. Pada tahun 2000, harga saham Enron mengalami kenaikan pesat, tetapi tahun 2001 hingga 2002 mengalami penurunan yang sangat drastis hingga hampir tidak berharga.

Kegagalan Andersen dalam menginvestigasi tindak kecurangan Enron berdampak pada investor yang menyebabkan menurunnya harga saham di pasar modal. Besarnya audit dan *consulting fee* yang diterima Andersen dari Enron memicu tindak skandal korporasi dan manipulasi temuan audit seperti pemusnahan dokumen. Walaupun pemusnahan dokumen tersebut sesuai dengan kebijakan internal audit, tetapi karena pemusnahan itu dilakukan pada saat munculnya kasus Enron ke publik hingga panggilan pengadilan, Andersen dianggap melanggar hukum dan kredibilitasnya pun menurun sehingga banyak klien yang memutuskan kerjasamanya.

Tanggal 15 Juni 2002 muncul berita bahwa perusahaan raksasa WorldCom mengalami masalah keuangan. Dalam kasus ini, pihak WorldCom dan Andersen saling menuduh. Pihak Andersen menganggap WorldCom tidak mengungkapkan penyimpangan pada auditor dan merasa telah melakukan standar audit dengan semestinya. Sedangkan WorldCom menganggap bahwa Andersen gagal menemukan penyimpangan yang ada (wikipedia.com).

Runtuhnya Enron dan WorldCom yang melibatkan salah satu KAP *big five* pada saat itu, memicu krisis terhadap kredibilitas tata kelola perusahaan, profesi akuntansi dan pelaporan akuntansi di seluruh dunia. Hal ini mendapat respon dari Kongres Amerika dengan diterbitkannya undang-undang *Sarbanax-Oxley Act* yang diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes dan wakil rakyat Michael Oxley (Suradi, 2010).

Undang – Undang Sarbanax-Oxley (UU SOX) membentuk suatu lembaga pemerintahan yang bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa, dan mendisiplinkan kantor-kantor akuntan sebagai auditor publik. Masalah yang diatur diantaranya adalah independensi auditor, tata kelola perusahaan, penilaian pengendalian internal, dan pelaporan laporan keuangan.

Dengan adanya lembaga ini, akan mengurangi tindak penipuan sekuritas dan pelaporan akuntansi. Dalam hal penekanan independensi dan kualitas audit, KAP dilarang memberikan jasa non-audit seperti konsultasi pada perusahaan yang mereka audit.

Terdapat aspek penting dalam SOX yang berkaitan dengan pengendalian internal dan pelaporan keuangan. Menurut *Section 302* (UU SOX, 2002),

manajemen diwajibkan untuk mengungkapkan semua kelemahan material dalam pengendalian internal, pada saat mereka mengesahkan laporan keuangan baik secara periodik, tahunan dan triwulanan. Menurut *Section 404* (UU SOX, 2002), perusahaan diwajibkan untuk menilai efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur dalam pelaporan keuangan dan mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan tahunannya.

Berdasarkan *Section 302* (UU SOX, 2002), manajemen bertanggung jawab terhadap pengendalian internal, mengevaluasi pengendalian internal dalam waktu sembilan puluh hari sebelum tanggal pelaporan dan dilaporkan tentang: (1) daftar semua kekurangan dalam pengendalian internal dan informasi pada setiap penipuan yang dilakukan karyawan serta yang terlibat dengan kegiatan pengendalian internal, (2) perubahan signifikan dalam pengendalian internal atau faktor-faktor terkait dengan dampak negatif pada pengendalian internal.

Section 404 (UU SOX, 2002) (a) mensyaratkan emiten untuk mengungkapkan informasi mengenai ruang lingkup dan kecukupan struktur pengendalian internal dan prosedur untuk pelaporan keuangan dalam laporan tahunan mereka. Pernyataan ini juga harus menilai keefektifan prosedur dan pengendalian internal. *Section 404*(UU SOX, 2002) (b) mengharuskan perusahaan audit terdaftar (KAP) dalam laporan yang sama, untuk membuktikan dan melaporkan efektivitas dari struktur pengendalian internal dan prosedur dalam pelaporan keuangan.

Salah satu isi Undang-Undang Sarbanax-Oxley juga mensyaratkan setiap perusahaan yang go publik harus mempunyai Komite Audit yang salah satu

anggotanya adalah orang yang ahli dalam bidang keuangan. Untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik seperti halnya pada UU SOX, Bursa Efek Indonesia (2004) juga mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap perusahaan yang terdaftar di BEI harus memiliki Komite Audit.

Dipertegas dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal NOMOR : KEP -41/PM/2003 mengenai pembentukan Komite audit dan Keputusan Direksi PT BEI No. 305 tahun 2004 mengenai peraturan pencatatan efek di Bursa yang mencakup Komisaris Independen, Komite audit, Sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor. Persyaratan ini telah ditetapkan oleh Bapepam di Indonesia melalui pedoman *good corporate governance* yang diterbitkan pada bulan Mei 2002. Selain itu didukung dengan Undang-Undang No 5 tahun 2011 mengenai akuntan publik.

Penyerahan peran pengawasan dari Dewan Komisaris kepada Komite Audit telah memperluas fungsi Komite Audit untuk mencakup area yang lebih luas termasuk mengawasi manajemen dan sistem pengendalian, dan menyetujui strategi perusahaan (De Zoort *et al.*, 2001). Porter (1991) dalam Wardhani (2006) menyatakan bahwa kesuksesan atau kegagalan suatu perusahaan kemungkinan disebabkan oleh strategi yang diterapkan oleh perusahaan.

Komite audit memberikan kontribusi bagi pengembangan rencana strategis perusahaan dengan memberikan masukan dan rekomendasi kepada dewan berkaitan dengan masalah keuangan atau operasional. Oleh karena itu, komite audit yang efektif akan fokus pada peningkatan kinerja dan daya saing perusahaan, terutama pada lingkungan bisnis yang berubah diluar kontrol

perusahaan (Craven dan Wallace, 2001 dalam Rahmat *et al.*,2008) dan fokus pada optimalisasi kekayaan pemegang saham sehingga dapat mencegah maksimalisasi kepentingan pribadi oleh manajemen.

Pengertian Audit Komite itu sendiri adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan mewajibkan perusahaan tercatat memiliki komite audit. Komite audit harus beranggotakan minimal tiga orang independen dan salah satunya memiliki keahlian dalam bidang akuntansi. Salah seorang anggota komite audit harus berasal dari komisaris independen yang merangkap sebagai ketua komite audit (Keputusan Ketua BAPEPAM NO Kep-29/PM/2004).

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit bertindak mandiri dalam pelaksanaan tugas maupun pelaporan serta bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit melakukan penilaian pada kegiatan dan hasil audit dari auditor internal dan auditor eksternal. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya tindak pelaksanaan dan pelaporan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar. Hal yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan.

Komite Audit mengidentifikasi berbagai hal yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris seperti adanya kejanggalan laporan keuangan. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan masih dalam lingkup tugas serta kewajiban, komite audit wajib melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Komite Audit memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, serta membantu untuk memantau efektifitas praktik good corporate governance yang diterapkan.

Komite audit yang independen membuktikan secara negatif terkait dengan kualitas laba perusahaan dan menurunkan manajemen laba (Suaryana, 2005, Siallagan, 2006). Semakin besar independensi dalam Komite audit, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba dan akan menyampaikan laba yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi Komite audit membantu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mengurangi kemungkinan manajer melakukan manajemen laba.

Beberapa penelitian telah melaporkan hasil penelitian tentang hubungan komite audit dan kualitas pelaporan keuangan. Beberapa penelitian cenderung untuk mendukung keberadaan komite audit karena meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Klien, 2002; DeFond dan Jiambalvo, 1994; McMullen, 1996; Beasley dan Salterio, 2001; McMullen dan Raghunandan, 1996). Di sisi lain hasil penelitian tidak menemukan perbedaan antara perusahaan yang membentuk dan tidak membentuk komite audit (Beasley, 1996; Kalbers, 1992; Crawford, 1987 di dalam McMullen, 1996).

Untuk menunjukkan kredibilitas laporan keuangan, sebagian besar perusahaan menggunakan jasa KAP *Big 4* sebagai auditor mereka. Penempatan auditor ini disebabkan oleh reputasi dan kredibilitas internasional yang dimiliki

auditor. Oleh karena itu, penunjukkan auditor *big 4* merupakan penanda bagi publik bahwa laporan keuangan yang dilaporkan memiliki kredibilitas yang tinggi. Studi-studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa auditor dalam kelompok big memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding non big. Hal ini disebabkan oleh kemampuan KAP dalam kelompok big dapat mencegah manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen (Francis et al., 1999; Becker et al., 1998). Menurut Siregar (2006) masalah keagenan di Indonesia relatif tinggi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Siregar (2006) juga mengemukakan bahwa pemegang saham pengendali cenderung melakukan ekspropriasi dengan mengurangi pembayaran dividen.

Dalam penelitian ini, menggunakan manajemen laba yang diukur sebagai akrual abnormal untuk menguji kualitas laba atau kualitas laporan keuangan. Copeland (1968 :10) dan Utami (2005) mendefinisikan manajemen laba sebagai, “*some ability to increase or decrease reported net income at will*”. Ini berarti bahwa manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimalkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajer. Scott (2000) dan Rahmawati dkk. (2006) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political costs (opportunistic earnings Manajement)*. Kedua, dengan memandang manajemen laba dari *perspektif efficient contracting (efficient earnings Manajement)*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan

dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Fischer dan Rosenzweig (1995) memandang manajemen laba sebagai serangkaian langkah yang dilakukan manajer untuk meningkatkan atau menurunkan jumlah laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan yang merupakan tanggung jawabnya tanpa menyebabkan penurunan atau peningkatan keuntungan yang dicapai suatu badan usaha dalam jangka panjang.

Penelitian ini sangat menarik untuk diteliti karena :

1. Manajemen laba merupakan masalah klasik dalam laporan keuangan di perusahaan yang perlu dituntaskan
2. Manajemen laba merupakan masalah yang abstrak bagi investor

Selain dari penjelasan di atas, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap regulasi Bapepam mengenai Komite Audit yang untuk kedepannya akan mempersiapkan kriteria dan fungsi pengawasan Komite Audit yang lebih dapat meminimalisir risiko pada perusahaan emiten. Kemudian juga dapat memberikan pengetahuan pada investor mengenai pentingnya fungsi-fungsi Audit internal, dan Audit Eksternal.

Objek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2011. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena : (1) adanya peraturan yang mengharuskan

perusahaan-perusahaan tersebut untuk memberikan informasi yang jelas dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangannya kepada Bapepam dan dipublikasikan, (2) jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia lebih banyak dibanding sektor-sektor lain, karena kemampuan analisis dalam suatu sektor diharapkan dapat menghasilkan simpulan yang dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, (3) perusahaan manufaktur mempunyai kriteria pengungkapan yang lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan perbankan, selain itu perusahaan perbankan cenderung mempunyai rasio hutang atas modal yang relatif sangat tinggi. Pemilihan tahun 2010 dan 2011 itu didasari karena ingin mengetahui pengungkapan kelemahan pengendalian internal setelah ditetapkannya SOX 2002 dan keputusan Bapepam. Selain itu tahun tersebut dipilih karena dianggap *up to date* yang menggambarkan profile perusahaan terkini.

Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba. Variabel independen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Komite Audit, Audit Internal, dan Audit Eksternal. Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti hubungan antara Komite Audit, Audit Internal, Audit Eksternal, dan Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur Indonesia yang terdaftar di BEI. Oleh karena itu judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Komite Audit, Audit Internal, dan Audit Eksternal terhadap Manajemen Laba” (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2011)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba?
2. Bagaimana pengaruh Komite Audit Independen terhadap Manajemen Laba?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Manajemen Laba?
4. Bagaimana pengaruh Audit Internal terhadap Manajemen Laba?
5. Bagaimana pengaruh Pertemuan antara Audit Internal dengan Komite Audit terhadap Manajemen Laba?
6. Bagaimana pengaruh Ukuran KAP terhadap Manajemen Laba?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba
- b. Menganalisis pengaruh Komite Audit Independen terhadap Manajemen Laba
- c. Menganalisis pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Manajemen Laba
- d. Menganalisis pengaruh Audit Internal terhadap Manajemen Laba

- e. Menganalisis pengaruh Pertemuan antara Audit Internal dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba
- f. Menganalisis pengaruh Ukuran KAP terhadap Manajemen Laba

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Bagi regulator, penelitian diharapkan memberikan masukan mengenai efektivitas pembentukan komite audit independen sesuai dengan peraturan BEJ 1 Juli 2001.
- b. Bagi manajemen, sebagai wacana tentang pentingnya peran komite audit untuk menghindari terjadinya *financial distressed*.
- c. Bagi kalangan akademisi dan pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian teoritis dan referensi.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diusulkan.

Bab III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan berbagai variabel penelitian dan definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut, penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan.

Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan deskripsi uji penelitian, analisis data dan pembahasan yang didasarkan atas hasil penelitian data.

Bab V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian. Sub bab tersebut masing-masing akan diuraikan sebagai berikut.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen, 1984).

Menurut Jensen (1984), teori ini mempunyai dua tujuan yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil (*The belief revision role*).
2. Mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara prinsipal dan agen sesuai dengan kontrak kerja (*The performance evaluation role*).

Teori Keagenan (Agency Theory) Jensen dan Meckling (1976) dalam Masdupi (2005, 59) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan

antara agen (manajemen suatu usaha) dan principal (pemilik usaha). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal.

Informasi laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu akan mengurangi asimetri informasi yang erat kaitannya dengan *teori agency* (Kim dan Verrechia, 1994) dalam (Saleh, 2004:897). Sehingga dalam hubungan keagenan, manajemen diharapkan dalam mengambil kebijakan perusahaan harus menguntungkan pemilik perusahaan. Bila keputusan manajemen merugikan bagi pemilik perusahaan maka akan timbul masalah keagenan (Ismiyanti dan Hanafi, 2004:176).

Kondisi perusahaan yang dilaporkan oleh manajer tidak sesuai atau tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan perbedaan informasi yang dimiliki antara manajer dengan pemegang saham. Sebagai pengelola, manajer lebih mengetahui keadaan yang ada dalam perusahaan daripada pemegang saham. Keadaan tersebut dikenal sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (Richardson, 1998).

Eisenhardt (1989), dalam Ujiyanto dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki

daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku oportunistis dari manajer, manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan. Masalah perbedaan kepentingan ini merupakan satu bentuk umum dari masalah keagenan.

Dalam artikelnya, Jensen (1986) mengemukakan masalah keagenan dapat terjadi karena *free cash flow* yaitu kelebihan kas atas jumlah yang dibutuhkan untuk mendanai investasi yang positif. Dengan adanya *free cash flow* yang terlalu banyak akan mempengaruhi perilaku manajer yang kemudian bisa memicu munculnya keputusan – keputusan yang tidak mencerminkan kepentingan pemegang saham. Menurut Jensen, untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu kontrol kinerja manajer yaitu dengan utang. Karena utang dapat memicu kinerja manajer supaya lebih efisien.

Dijelaskan dalam Brigham *et al.*(1999) bahwa terdapat sejumlah mekanisme yang cenderung mendorong manajer melakukan hal terbaik untuk pemegang saham, yaitu:

1. Ancaman pemecatan.
2. Ancaman pengambilalihan.
3. Pembentukan struktur dan insentif manajer.

Dengan adanya ancaman – ancaman di atas, maka diharapkan manajer akan bekerja secara maksimal dengan meningkatkan laba secara wajar dan menjaga agar laba tidak turun. Hal ini akan saling menguntungkan prinsipal dan agen. Principal akan memperoleh pengembalian deviden yang tinggi dan agen akan mendapat insentif yang tinggi pula.

2.1.2 Undang-Undang Sarbanes Oxley

Sarbanes-Oxley Act merupakan sebuah landasan hukum yang ditandatangani oleh Presiden W. Bush pada tanggal 20 Juli 2002 di Washington, USA yang berisi mengenai perlindungan investor dan pengaturan akuntansi perusahaan publik (Wikipedia).

Sarbanes-Oxley atau sering disebut SOX mendasari dibentuknya PCAOB (Public Accounting Oversight Board). Dewan ini mempunyai tugas untuk membuat standar audit bagi auditor eksternal perusahaan publik yang terdaftar di SEC. Selain itu juga melakukan pengawasan apakah sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan.

SOX mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk mempunyai komite audit independen yang mempunyai tugas untuk melakukan seleksi, menentukan kompensasi, dan mengawasi auditor eksternal (SOX Section 301). Perusahaan harus menyajikan semua transaksi yang bersifat material. Apabila ada perubahan

yang bersifat material maka harus disajikan setiap perubahan itu dengan cepat (SOX Section 409).

Untuk menjaga independensi auditor eksternal, maka SOX melarang kepada setiap auditor eksternal untuk memberikan jasa non-audit kepada kliennya seperti jasa akuntansi, desain/implementasi sistem informasi keuangan, penilaian (appraisal), internal audit outsourcing, investment banking, broker, dan sebagainya (SOX Section 201).

Terkait dengan SOX, di Indonesia sendiri memiliki undang – undang yang dikeluarkan oleh lembaga resmi tertentu yang memiliki kesamaan dengan SOX. Salah satu diantaranya adalah Badan Pengelola Pasar Modal yang telah mengeluarkan peraturan Bapepam pada Desember 2003 mengenai tanggungjawab direksi terhadap laporan keuangan.

2.1.3 Undang-Undang No 5 Tahun 2011

Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan.

Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Dengan demikian,

tanggung jawab Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas, sedangkan penyajian laporan atau informasi keuangan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen.

Sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha, dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa Akuntan Publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, Akuntan Publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik.

Meskipun Akuntan Publik berupaya untuk senantiasa memutakhirkan kompetensi dan meningkatkan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa, kemungkinan terjadinya kegagalan dalam pemberian jasa Akuntan Publik akan tetap ada. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan sekaligus melindungi profesi Akuntan Publik, diperlukan suatu undang-undang yang mengatur profesi Akuntan Publik.

Sampai saat terbentuknya Undang-Undang ini, di Indonesia belum ada undang-undang yang khusus mengatur profesi Akuntan Publik. Undang-undang yang ada adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (*Accountant*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 705). Pengaturan mengenai profesi Akuntan Publik dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954

tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini dan tidak mengatur hal-hal yang mendasar dalam profesi Akuntan Publik.

Oleh karena itu, disusunlah Undang-Undang tentang Akuntan Publik yang mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi Akuntan Publik, dengan tujuan untuk :

1. melindungi kepentingan publik
2. mendukung perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan
3. memelihara integritas profesi Akuntan Publik
4. meningkatkan kompetensi dan kualitas profesi Akuntan Publik
5. melindungi kepentingan profesi Akuntan Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi.

2.1.4 Good Corporate Governance

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan Corporate Governance sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen, board dan pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate Governance juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja.

Sedangkan menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG), corporate governance adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.

Turnbull Report mendefinisikan corporate governance sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola

risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.

Sementara itu Cadbury Committee dari Inggris mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat aturan yang merumuskan 12 hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Pelaksanaan good corporate governance dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Prinsip - prinsip dasar ini diharapkan menjadi rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun framework bagi penerapan good corporate governance. Prinsip-prinsip dasar penerapan good corporate governance yang dikemukakan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) adalah sebagai berikut :

1. Fairness (Kewajaran)

Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (insider trading).

2. Transparansi

Hak-hak para pemegang saham yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam

pengambilan keputusan mengenai perubahan - perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

3. Accountability (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan balance of power antara manajer, pemegang saham, Dewan Komisaris dan auditor.

4. Responsibility (Responsibilitas)

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan.

Manfaat dari pelaksanaan good corporate governance menurut FCGI :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden.

2.1.5 Komite Audit

Sejak dikeluarkannya Keputusan Direksi BEJ No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal : Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum

Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, keberadaan Komite Audit di perusahaan publik resmi dimulai.

Pengertian Komite Audit itu sendiri adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan mewajibkan perusahaan tercatat memiliki komite audit. Komite audit harus beranggotakan minimal tiga orang independen dan salah satunya memiliki keahlian dalam bidang akuntansi. Salah seorang anggota komite audit harus berasal dari komisaris independen yang merangkap sebagai ketua komite audit (Keputusan Ketua BAPEPAM NO Kep-29/PM/2004).

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit bertindak mandiri dalam pelaksanaan tugas maupun pelaporan serta bertanggungjawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit melakukan penilaian pada kegiatan dan hasil audit dari auditor internal dan auditor eksternal. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya tindak pelaksanaan dan pelaporan yang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar. Hal yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan.

Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang:

- a. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik
- b. Bukan merupakan orang yang bekerja pada Emiten dan Perusahaan Publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

- c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik
- d. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik
- e. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik
- f. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

Komite Audit mengidentifikasi berbagai hal yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris seperti adanya kejangalan laporan keuangan. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan masih dalam lingkup tugas serta kewajiban, komite audit wajib melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Komite Audit memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, serta membantu untuk memantau efektifitas praktik good corporate governance yang diterapkan.

Beberapa ketentuan Komite Audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit

- b. Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- c. Kep. 339/BEJ/2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit
- d. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit
- e. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.

Fungsi Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris:

- a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
- b. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan
- c. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit bertugas:

- a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
- c. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Hal ini dituangkan dalam *Audit Committe Charter* atau Piagam Komite Audit yang merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen Komisaris dan Dewan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan.

Piagam Komite Audit ini akan menjadi acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang kemudian akan

disosialisasikan ke seuruh pihak terkait dalam perusahaan. Selain itu, dapat membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai Komite Audit.

Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Piagam Komite Audit yang paling kurang memuat:

1. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang
2. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan
3. Tata cara dan prosedur kerja
4. Kebijakan penyelenggaraan rapat
5. Sistem pelaporan kegiatan
6. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan

Struktur Komite Audit di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 117 tahun 2002 untuk perusahaan BUMN dan untuk perusahaan publik diatur dalam Keputusan BEJ dan Peraturan Bapepam yang relevan. Ketentuan mengenai Struktur Komite Audit menurut Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut :

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai ketua Komite Audit. Dalam hal ini Komisaris Independen yang

menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Persyaratan keanggotaan Komite Audit menurut Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Komite Audit wajib:
 1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai, serta mampu berkomunikasi dengan baik
 2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, proses audit, manajemen resiko, dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang – undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang – undangan terkait lainnya.
- b. Paling kurang satu diantara anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan
- c. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi *jasa atestasi*, *jasa non-atestasi* dan atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir
- d. Bukan merupakan orang yang bekerja pada Emiten atau Perusahaan Publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen

- e. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain
- f. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama atau Perusahaan Publik
- g. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik
- h. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

Komite Audit merupakan salah satu elemen yang bertanggung jawab untuk mengawasi kepentingan pemegang saham dan mengawasi laporan keuangan. Oleh karena itu Komite Audit harus efektif dan memberikan transparansi maksimal.

Menurut DeZoort et al. (2002), Efektifitas Komite Audit dapat didefinisikan sebagai berikut:

Memiliki anggota yang memenuhi syarat dengan kewenangan dan sumber daya untuk melindungi pemegang saham dengan memastikan pelaporan keuangan yang andal, pengendalian internal, dan manajemen resiko melalui upaya pengawasan yang rajin.

Untuk mengukur Keefektifan Komite Audit, menggunakan tiga kelompok studi: Komite audit independen, Ukuran Komite Audit, dan Jumlah rapat komite audit.

2.1.3.1 Ukuran Komite Audit

Laporan dan keputusan mengenai Ukuran Komite Audit disebutkan dalam beberapa Undang – Undang dan peraturan. Cadbury Report (1992) dan The Smith Report merekomendasikan minimal tiga anggota pada komite audit. The Blue Ribbon Committee Report (1999) merekomendasikan minimal tiga anggota dan empat pertemuan dalam satu tahun untuk efektifitas Komite Audit. The Sarbanas-Oxley Act (2002) menetapkan minimal tiga anggota.

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, anggota Komite Audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang mempunyai kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan. Berdasarkan pedoman corporate governance FCGI, anggota Komite Audit harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi dan keuangan, serta memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Setidaknya satu anggota Komite Audit juga harus mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan.

2.1.3.2 Komite audit independen

Menurut artikel FCGI (2000) tentang peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Corporate Governance menyatakan bahwa Independensi Dewan Komisaris di Indonesia masih sangat diragukan. Hal ini berdasarkan pada

posisi Dewan Komisaris diberikan berdasarkan hubungan keluarga atau hubungan dekat dan dalam masalah penggajian, gaji Dewan Komisaris didasarkan pada persentase gaji Dewan Direksi.

Berdasar hal di atas, maka keberadaan sebuah komite yang independen harus diterapkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Independensi merupakan landasan dari efektivitas komite audit (Tugiman 1995). Untuk menjamin independensi, Bapepam (2004) menetapkan persyaratan bagi pihak-pihak yang menjadi anggota komite audit yaitu:

- a. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
- b. Bukan merupakan orang yang bekerja pada Emiten dan Perusahaan Publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
- e. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
- f. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Krishnan (2005) menyatakan bahwa ada hubungan yang positif diantara komite audit independen dengan kualitas pengendalian internal suatu perusahaan setelah ditetapkannya SOX. Berdasarkan SOX, anggota Komite Audit dikatakan independen jika tidak berafiliasi dengan perusahaan tidak menerima *consulting fees*. Salah satu dari beberapa alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

2.1.3.3 Jumlah Rapat Komite Audit

Pertemuan Komite Audit berfungsi sebagai media formal untuk para anggota Komite Audit dalam rangka pengawasan proses *corporate governance*. Artikel FCGI (2002) menyebutkan bahwa Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut sistem pelaporan keuangan. Treadway Commission (1987) dalam Sori, et al., (2007) juga menyatakan Komite Audit sebaiknya bertemu minimal empat kali dalam satu tahun. Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Selain melakukan pertemuan dengan pihak internal, Komite Audit juga mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak luar keanggotaan Komite Audit

seperti komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal.

2.1.4 Audit Internal

Pengertian audit internal menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam SPAP (Standar Pelaporan Akuntan Publik) adalah : “Suatu aktivitas penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas organisasi sebagai pemberi bantuan bagi manajemen” (1998 ; 322). Sedangkan menurut Brink Z. Victor dan Witt Herbert dalam bukunya “Modern Internal Auditing” mengemukakan bahwa “Audit Internal adalah fungsi penilai independen yang dibentuk dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan sebagai layanan untuk organisasi” (199;1-1).

Dalam melaksanakan fungsinya, Auditor Internal melakukan penyelidikan dan meneliti keefektifan aktivitas perusahaan. Dengan pelaksanaan tersebut maka akan dapat diketahui apakah berbagai departemen yang ada melaksanakan fungsinya dengan baik atau tidak. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Audit Internal menjadi suatu alat pengawasan yang penting dalam mengukur dan menilai keefektifan aktivitas yang ada dalam perusahaan.

Pada dasarnya, tujuan Audit Internal adalah untuk membantu semua anggota direksi dan manajemen dalam pelaksanaan tugasnya secara efektif dengan menyediakan data yang objektif dan memberikan penilaian, rekomendasi atas aktivitas yang diperiksa.

Tujuan Audit Internal menurut D. Hartanto dalam bukunya “akuntansi untuk Usahawan” (1994 ; 294) adalah sebagai berikut:

1. Meneliti dan menilai apakah pelaksanaan daripada pengendalian intern di bidang akuntansi dan operasi cukup dan memenuhi syarat.
2. Menilai apakah kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditentukan betul-betul ditaati.
3. Menilai apakah aktiva perusahaan aman dari kehilangan atau kerusakan dan penyelewengan.
4. Menilai kecermatan data akuntansi dan data lain dalam organisasi perusahaan.
5. Menilai mutu atau pelaksanaan daripada tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing manajemen”.

Untuk mendukung kerjanya, Audit Internal memiliki wewenang penuh untuk memasuki semua bagian perusahaan, meneliti catatan – catatan harta milik pegawai dan perusahaan. Oleh karena itu, wewenang dan tanggung jawab Audit Internal harus ditetapkan secara jelas sesuai kebijakan manajemen. Lawrence B. Sawyer dalam bukunya “The practice of Internal Auditing” mengemukakan wewenang Audit Internal sebagai berikut:

“Audit Intern menguji dan mengevaluasi kecermatan dan keberhasilan dari pengendalian intern yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya, agar tercapai tujuan perusahaan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Guna melaksanakan tugasnya, pimpinan dan staf dari pemeriksa intern memiliki wewenang penuh untuk memasuki semua bagian perusahaan, meneliti catatan-catatan, harta dan pegawai perusahaan”. (1981; 13-hal.3)

Fungsi audit internal telah menjadi mekanisme penting untuk perusahaan governance dalam beberapa tahun terakhir (IIA 2005). Karena Audit Internal akan berguna dalam hal pengawasan kinerja agar sesuai dengan standar yang ada

sehingga tindak manajemen laba dapat dicegah. Audit Internal menjadi pengawas aktivitas pertama sebelum Komite Audit dan Auditor Eksternal. Dengan adanya Audit Internal yang baik diharapkan perusahaan akan melakukan aktivitasnya dengan baik.

Gramling et al. (2004) berpendapat, fungsi audit internal merupakan salah satu dari empat pilar tata kelola perusahaan. Kepala fungsi audit internal harus menginformasikan tentang kemajuan mereka kepada komite audit. Cooper et al. 1989, mengklaim bahwa hubungan yang baik antara komite audit dan auditor internal diperlukan untuk efektivitas pengendalian internal yang baik mekanisme dan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

2.1.5 Audit Eksternal

Audit eksternal adalah pemeriksaan eksternal dari laporan keuangan perusahaan yang dipersiapkan oleh suatu organisasi tertentu. Tujuan dari Audit eksternal adalah untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan kondisi sebenarnya tanpa adanya tindak kecurangan di dalamnya. Kegiatan Audit Eksternal dimaksudkan sebagai persyaratan pada perusahaan yang go public untuk memberikan bukti akan kebenaran laporan keuangan kepada investor. Selain itu juga bisa dimaksudkan untuk melakukan tugas khusus seperti penyelidikan (Wikipedia).

Auditor hanya memiliki waktu yang sangat terbatas dalam melakukan pekerjaannya, oleh karena itu mereka hanya berkonsentrasi pada pengujian validitas dari beberapa sampel dari pada mengecek semuanya. Walaupun auditor adalah independen dalam mengerjakan pekerjaannya, mereka tetap menerima gaji

dari kliennya , bukan dari pihak ketiga. Hal inilah yang memicu adanya tindak kecurangan seperti pada kasus Enron.

Terdapat lima pendapat yang mungkin diberikan oleh akuntan publik atas laporan keuangan yang diauditnya (Mulyadi, 2002: 19). Pendapat tersebut adalah:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan keuangan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien, pemakai informasi keuangan, maupun oleh auditor. Kata wajar dalam paragraph pendapat mempunyai makna:

- a. Bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran.
- b. Lengkap informasinya.

2. Laporan yang Berisi Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (Unqualified Opinion Report with Explanatory Language).

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit bentuk baku.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Auditor memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit, jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini:

- a. Lingkup audit dibatasi oleh klien.
- b. Auditor tidak dapat melaksanakan prosedur audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor.
- c. Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- d. Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

4. Pendapat tidak Wajar (Adverse Opinion)

Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien. Auditor juga akan memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang terdapat dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya dan tidak dapat digunakan oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

5. Pernyataan tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion).

Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinion report). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah:

- a. Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkungan audit.
- b. Auditor tidak Independen dalam hubungannya dengan kliennya.

Selain yang disebut di atas, biasanya Auditor juga memberikan surat manajemen yang berisi kelemahan internal manajemen. Surat ini ditujukan kepada pihak manajemen agar merespon rekomendasi yang diberikan sehingga kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik.

Kantor akuntan publik adalah organisasi yang diciptakan untuk memberikan jasa akuntansi profesional, termasuk audit. Biasanya didirikan sebagai kepemilikan pribadi atau persekutuan (Messier, Grover dan Prawit, 2005;74). Balsam (2003) menyatakan bahwa kualitas audit yang tinggi (dalam hal ini KAP *BIG N*) dapat mendeteksi manajemen laba karena pengetahuan superior mereka dan menekan manajemen laba *opportunitis* untuk menjaga reputasi mereka. Mayangsari (2004) menyatakan bahwa auditor berkualitas tinggi memberikan kepastian yang besar terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip berterima umum. Davidson dan Neu (1993) menyatakan bahwa jika risiko klien dianggap konstan, manajemen ketika membuat ramalan laba tersebut bersikap jujur dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap ramalan itu sendiri.

2.1.6 Manajemen Laba

Copeland (1968 :10) mendefinisikan manajemen laba sebagai, “*some ability to increase or decrease reported net income at will*”. Ini berarti bahwa manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimalkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajer. Scott (2000) dalam Rahmawati dkk. (2006) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua.

1. Melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political costs (opportunistic earnings management)*.
2. Memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting (efficient earnings management)*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Faktor-faktor manajemen laba yang diajukan Watt dan Zimmerman (1996) dalam Sucipto dan Purwaningsih (2007) adalah:

- a. Bonus Plan Hypothesis

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan

bonus besar berdasarkan laba lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

b. Debt Covenant Hypothesis

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba (Sweeney, 1994 dalam Rahmawati dkk, (2006). Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal.

c. Political Cost Hypothesis

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera mengambil tindakan, misalnya: mengenakan peraturan antitrust, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.

Scott (2000) dalam Rahmawati, dkk (2006) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba:

a. Bonus Purpose

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara opportunistic untuk melakukan laba dengan memaksimalkan laba saat ini (Healy, 1985).

b. Political Motivations

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

c. Taxation Motivations

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.

d. Pergantian CEO

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

e. Initial Public Offering (IPO)

Perusahaan yang akan go public belum memiliki harga pasar sehingga perlu menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Hal ini menyebabkan manajer perusahaan yang go public melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya.

f. Pentingnya memberi informasi kepada investor

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

Menurut Scott (2003:383) berbagai pola yang sering dilakukan manajer dalam earning manajemen adalah:

a. Taking a bath

Terjadinya taking a bath pada periode [stress](#) atau reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru. Bila perusahaan harus melaporkan laba yang tinggi, manajer dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi,

konsekuensinya manajer akan menghapus aktiva dengan harapan laba yang akan datang dapat meningkat. Bentuk ini mengakui adanya biaya pada periode yang akan datang sebagai kerugian pada periode berjalan, ketika kondisi buruk yang tidak menguntungkan tidak dapat dihindari pada periode tersebut. Untuk itu manajemen harus menghapus beberapa aktiva dan membebankan perkiraan biaya yang akan datang pada saat ini serta melakukan clear the desk, sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang meningkat.

b. Income minimization

Bentuk ini mirip dengan "taking a bath", tetapi lebih sedikit ekstrim, yakni dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud dan mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis, kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan, hasil akuntansi untuk biaya eksplorasi.

c. Income maximization

Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Perencanaan bonus yang didasarkan pada data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus

tahunan. Jadi tindakan ini dilakukan pada saat laba menurun. Perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang mungkin akan memaksimalkan pendapatan.

d. Income smoothing

Bentuk ini mungkin yang paling menarik. Hal ini dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Teknik untuk merekayasa laba dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok (Setiawati dan Na'im, 2000).

- a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, antara lain: estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi.
- b. Mengubah metode akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: mengubah metode depresiasi aktiva tetap yaitu dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
- c. Menggeser periode biaya atau pendapatan, misalnya: mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, menjual investasi sekuritas untuk

memanipulasi tingkat laba, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai.

Pendekatan lain yang digunakan dalam mengendalikan net income (Lontoh dan Lindrawati, 2004):

- a. Mengendalikan transaksi-transaksi akrual, dimana transaksi akrual memiliki pengaruh terhadap pendapatan dan biaya namun tidak tampil pada arus kas. Contoh: amortisasi dan depresiasi adalah sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan dalam hal menentukan masa manfaatnya sehingga perusahaan dapat mengatur besarnya pembebanan pada biaya sesuai keinginan manajemen dalam rangka mencapai hasil akhir pada net income yang diinginkan. Terdapat dua konsep akrual yaitu: discretionary accrual dan non discretionary accrual. Discretionary accrual adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen, sedangkan non discretionary accrual adalah pengakuan akrual laba yang wajar, yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Mengubah kebijakan akuntansi, manajemen juga dapat menentukan net income yang diinginkan, namun hasrat manajemen untuk melaksanakan hal ini tidak sekuat accrual items. Alasannya adalah manajemen harus menjelaskannya dalam disclosure pada laporan keuangan tahunan. Dan alasan ini adalah bahwa standar akuntansi tentang konsistensi mencegah terjadinya perubahan kebijakan akuntansi sesering mungkin. Contohnya adalah merubah metode pencatatan dari LIFO menjadi FIFO

2.1.7 Faktor Lain yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Manajemen Laba tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor seperti Jumlah Aset, Leverage dan ZMIJEWSKI Financial Score (1984).

2.1.7.1 Jumlah Aset

Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Bagi manajemen, di dalam membaca neraca, nilai aset perlu dicermati karena menjadi dasar pengukuran prestasi keuangan perusahaan. Ukuran ini menjadi pembanding prestasi suatu perusahaan dengan prestasi perusahaan lain dalam hal yang sama, apakah lebih baik atau tidak, sehingga dapat menjadi dasar keputusan manajemen untuk mempertahankan atau meningkatkannya (Wikipedia). Total aset di sini berfungsi sebagai wakil ukuran perusahaan.

2.1.7.2 Leverage

Joel G dan Jae K dalam Kamus Istilah Akuntansi (1999:267) mendefinisikan Leverage sebagai berikut :

“Istilah yang biasa dipergunakan dalam keuangan dan akuntansi untuk menjelaskan kemampuan biaya tetap untuk meningkatkan laba bagi pemilik perusahaan”.

Sedangkan menurut Bambang Riyanto(2001) , Leverage adalah

“Penggunaan aktiva atau dana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap”.

Pengertian lain dari Leverage menurut Lukman Syamsuddin dalam bukunya Manajemen Keuangan Perusahaan (2001:89) adalah :

“Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (fixed cost assets or funds) untuk memperbesar tingkat penghasilan (return) bagi pemilik perusahaan”.

Leverage yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Financial Leverage.

Financial Leverage menurut Lukman Syamsuddin, dalam bukunya Manajemen Keuangan Perusahaan (2001:113) menjelaskan Financial Leverage adalah :

“Sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap untuk memperbesar pengaruh perubahan EBIT terhadap pendapatan per lembar saham biasa (Earning Per Share)”.

Menurut Syafrudin Alwi (2001:301) “Financial Leverage merupakan perbandingan total hutang dengan seluruh dana atau aktiva dalam perusahaan yang disebut leverage factor”. Karena Leverage berpengaruh terhadap EPS, maka hal ini akan menimbulkan kecenderungan manajemen untuk melakukan manajemen laba.

2.1.7.3 ZMIJEWSKI Financial Score (X-Score)

Zmijewski (1983) melakukan penelitian dengan memprediksi kebangkrutan perusahaan melalui validitas rasio keuangan. Sampel yang diteliti ada 75 perusahaan yang bangkrut, 3573 perusahaan sehat selama tahun 1972 sampai dengan 1978. Indikator F-test terhadap rasio – rasio kelompok, Rate of Return, liquidity, leverage, turnover, fixed payment coverage, trends, firm size, dan stock return volatility, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang sehat dan yang tidak sehat.

Dengan diketahuinya prediksi kebangkrutan perusahaan, maka akan memicu tindakan manajemen laba, dimaksudkan supaya prediksi kebangkrutan ini bisa meleset karena laba telah dimanipulasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan komite audit, audit internal, audit eksternal dan manajemen laba dan yang telah dilakukan oleh para penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan dan beberapa poin penting dijadikan dasar dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu mengenai komite audit, audit internal, audit eksternal dan manajemen laba:

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005) tentang pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance terhadap pengelolaan laba (earnings management). Menunjukkan dua hasil yaitu: (1) Kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. (2) Kepemilikan institusional dan tiga variabel praktek GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Nasution dan Setiawan (2007) menguji Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. Dihasilkan, (1) Komposisi dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. (2) Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Fitriasari, Debby (2007) meneliti Pengaruh Aktivitas Dan Financial Literacy Komite Audit Terhadap Jenis Manajemen Laba. Efektivitas komite audit dari sisi input dan prosesnya terbukti tidak bisa membuat jenis manajemen laba yang dilakukan perusahaan menjadi lebih efisien. Aktivitas rapat komite audit

dengan fungsi SPI perusahaan ternyata tidak efektif untuk mengurangi manajemen laba yang bersifat oportunistik.

Luhglatno (2010) meneliti tentang pengaruh kelompok *Big four* dan KAP spesialis industri dalam membatasi manajemen laba pada perusahaan yang melakukan IPO. Objek penelitiannya adalah perusahaan yang melakukan IPO di Indonesia selama periode tahun 2002–2006. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa KAP *Big four* dan KAP spesialis industri terbukti tidak mampu membatasi praktik manajemen laba bagi perusahaan yang diauditnya pada saat perusahaan melakukan IPO.

Beberapa hasil pengujian dari para penelitian terdahulu dapat dilihat dari Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Variabel	Hasil
1	Siregar dan Utama (2005)	Independen: Kepemilikan, ukuran perusahaan, praktek Corporate Governance Dependen: Manajemen Laba	Kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional dan tiga variabel praktek GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
2	Nasution dan Setiawan (2007)	Independen: GCG Dependen: Manajemen Laba	Komposisi dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
3	Fitriasari, Debby (2007)	Independen: Aktivitas Dan Financial Literacy Komite Audit Dependen: Manajemen Laba	Efektivitas komite audit dari sisi input dan prosesnya terbukti tidak bisa membuat jenis manajemen laba yang dilakukan perusahaan menjadi lebih efisien. Aktivitas rapat komite audit dengan fungsi SPI perusahaan ternyata tidak efektif untuk mengurangi manajemen laba yang bersifat oportunistik

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
Lanjutan

4	Luhglatno (2010)	KAP <i>Big four</i> , KAP spesialisasi Industri, manajemen laba	KAP <i>big four</i> dan KAP spesialisasi industri tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba bagi perusahaan yang melakukan IPO di Indonesia
5	Laura (2010)	Y = Manajemen Laba X = Komite Audit Independen, Ukuran Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Audit Internal, Pertemuan Audit Internal dengan Komite Audit, Perusahaan yang Mempunyai Komite Audit Efektif dan Audit Internal	Ukuran Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Audit Internal dan Perusahaan yang Mempunyai Komite Audit Efektif dan Audit Internal berhubungan signifikan negatif dengan manajemen laba

2.3 Kerangka Pemikiran

Efek konflik kepentingan dalam Teori Keagenan mengakibatkan munculnya kemungkinan tinggi akan adanya manajemen laba. Pihak manajemen lebih mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya daripada pemilik saham. Hal ini akan memicu tindak kecurangan oleh manajemen dalam bentuk memaparkan laba yang terkesan selalu stabil atau bahkan meningkat padahal laba sebenarnya menurun atau bahkan rugi.

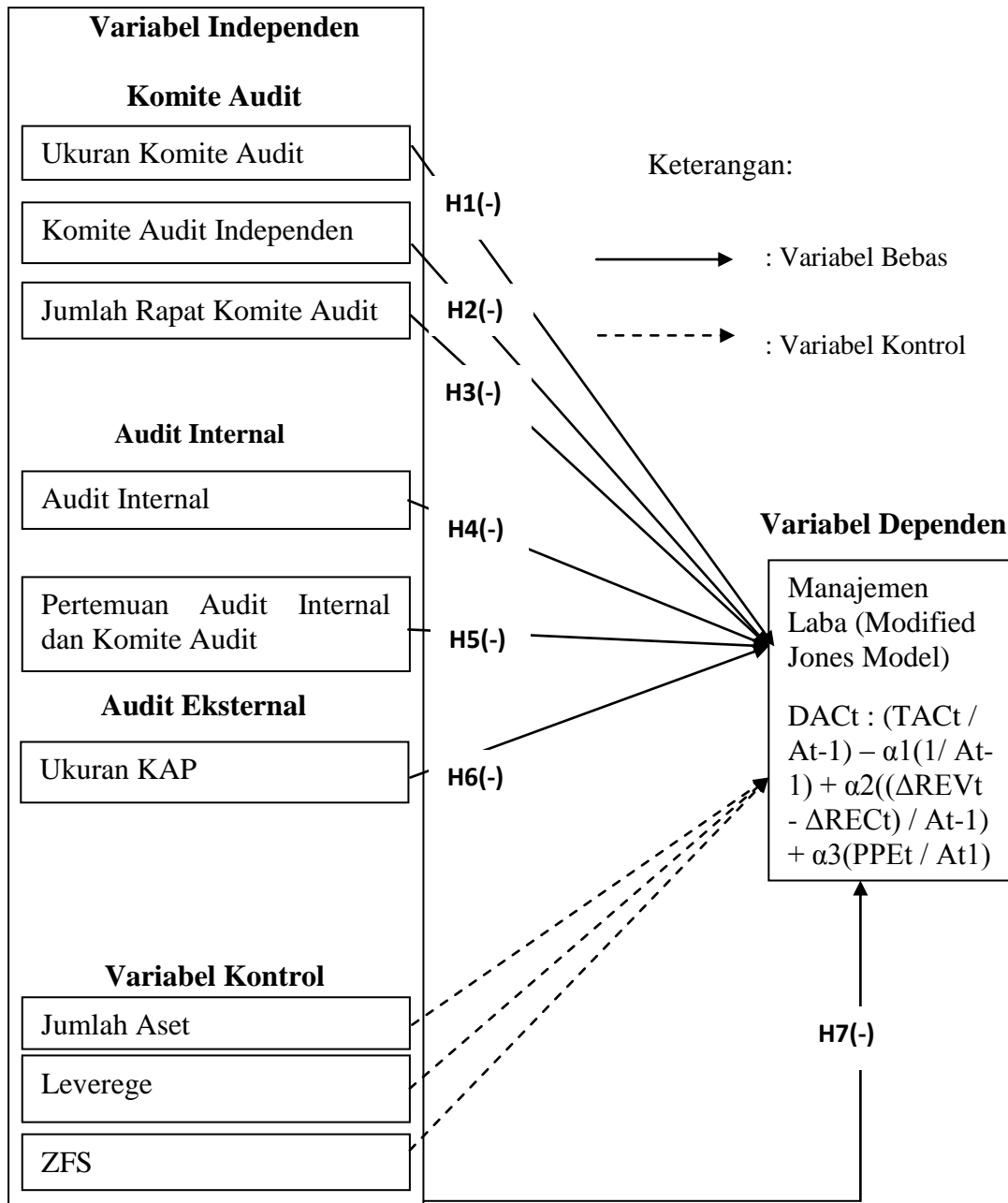
Manajemen Laba ini dilakukan oleh manajemen dengan tujuan agar tetap diberikan gaji seperti biasa atau bahkan diberikan bonus lebih oleh perusahaan. Sehingga mereka terhindar dari pemecatan karena laba sesungguhnya turun atau bahkan rugi.

Untuk mencegah terjadinya hal seperti ini, maka diperlukan adanya Komite Audit yang efektif dan adanya audit internal. Komite Audit ini membantu dewan komisaris untuk mengawasi aktivitas manajemen agar sesuai dengan standar yang ada. Pekerjaan ini dibantu oleh Audit Internal dalam pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengawasan internal. Ketika internal audit menemukan masalah dalam pengendalian internal, temuan audit tersebut akan dilaporkan ke Presiden Direktur, CEO, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan ke Direktur dan pimpinan Grup terkait. Komite Audit dan Audit Internal merupakan pihak Internal perusahaan. Oleh karena itu masih ada kemungkinan adanya tindakan manajemen laba. Hal ini akan diminimalisir oleh adanya fungsi Audit Eksternal oleh KAP

Dari penjelasan di atas dan telaah penelitian – penelitian terdahulu, penelitian ini menguji pada pengaruh komite audit, audit internal dan audit eksternal terhadap manajemen laba. Variabel yang digunakan adalah Komite Audit, Audit Internal, Audit Eksternal dan Manajemen Laba, serta beberapa faktor lain yang mempengaruhi Manajemen Laba seperti Jumlah Aset, Leverage, Kerugian, dan ZMIJEWSKI Financial Score (X-Score). Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 2.1 menunjukkan hubungan antara variabel Independen dengan variabel Dependen dan variabel kontrol dengan Dependen yang kemudian menghasilkan tujuh hipotesis yang dijelaskan di sub bab berikut.

2.4.Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Untuk melihat keefektifan Komite Audit, penelitian ini menggunakan independensi, ukuran, dan jumlah rapat komite audit. Menurut DeZoort et al. (2002), Komite Audit yang efektif didefinisikan sebagai berikut:

“memiliki anggota yang memenuhi syarat dengan kewenangan dan sumber daya untuk melindungi kepentingan stakeholder dengan memastikan pelaporan keuangan dapat diandalkan, kontrol internal, dan risiko manajemen melalui pengawasan yang ketat”

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, anggota Komite Audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang mempunyai kemampuan di bidang akuntansi atau keuangan. Beasley dan Salterio (2001), dalam sampel dari 627 perusahaan di Kanada pada tahun 1994, menghasilkan bukti bahwa ukuran Komite Audit berhubungan positif terhadap Manajemen Laba. Rahman dan Ali (2006), dalam sampel 97 perusahaan Malaysia menghasilkan adanya hubungan positif antara ukuran Komite Audit dengan Manajemen Laba. Ternyata ada beberapa penelitian yang membuktikan tidak adanya hubungan positif antara ukuran Komite Audit dengan Manajemen Laba. Lin et al. (2006) dalam studi dari 212 perusahaan AS, menghasilkan hubungan negatif. Abbott et al. (2004) pada 44 penipuan dan 44 non-penipuan perusahaan di AS, menyatakan bahwa tidak

adanya hubungan yang signifikan. Dari penjelasan di atas maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H1 Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Komite Audit yang dibentuk dari direktur eksternal dan independen akan menghasilkan akuntabilitas yang baik dan transparansi. Klein (2002) melakukan studi terhadap 692 perusahaan di AS dan hasil menunjukkan bahwa audit kemerdekaan komite berhubungan negatif terkait dengan akrual yang abnormal, dan pengurangan komite audit independen dikaitkan dengan peningkatan besar dalam akrual abnormal. Yan Zhang , JianZhou, Nan Zhou (2007) menemukan bahwa Ada relasi antara kualitas komite audit, independensi auditor, dan kelemahan pengendalian internal. Jayanthi Krishnan (2005) menghasilkan bahwa Adanya indikasi bahwa komite audit independen dan komite audit dengan keahlian keuangan cenderung dikaitkan dengan kejadian masalah pengendalian internal. Bradbury et al. (2004) menemukan bahwa Komite audit independen berkaitan dengan akuntansi berkualitas tinggi.

Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa Komite audit independen akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga akan memicu rendahnya tingkat manajemen laba. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2 Komite audit independen berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba

Selain menggunakan ukuran komite audit dan komite audit independen, digunakan juga jumlah rapat komite audit sebagai pengukur keefektifan Komite Audit. Artikel FCGI (2002) menyebutkan bahwa Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut sistem pelaporan keuangan. Treadway Commission (1987) dalam Sori, et al., (2007) juga menyatakan Komite Audit sebaiknya bertemu minimal empat kali dalam satu tahun. Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Kalbers dan Fogarty (1998) menemukan bahwa jumlah pertemuan berhubungan dengan keefektifan Komite Audit. Abbott dan Parker (2000) menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan pertemuan Komite Audit setidaknya dua kali dalam setahun kemungkinan besar menggunakan jasa KAP *Big Four*. Sedangkan menurut Goodwin dan Kent (2006) dalam sampel 401 perusahaan di Australia, bahwa semakin sering dilakukan pertemuan maka semakin tinggi biaya auditnya.

Dari penjelasan mengenai ukuran komite audit, tidak ditemukan hubungan yang jelas terhadap kualitas laporan keuangannya. Maka Hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3 Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.4.2 Pengaruh Audit Internal terhadap Manajemen Laba

Dalam melaksanakan fungsinya, Auditor Internal melakukan penyelidikan dan meneliti keefektifan aktivitas perusahaan. Dengan pelaksanaan tersebut maka akan dapat diketahui apakah berbagai departemen yang ada melaksanakan fungsinya dengan baik atau tidak. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Audit Internal menjadi suatu alat pengawasan yang penting dalam mengukur dan menilai keefektifan aktivitas yang ada dalam perusahaan.

Dalam penelitian ini akan dilihat pertama, apakah perusahaan mempunyai fungsi audit internal. Kedua, apakah Komite Audit dan fungsi Audit Internal memiliki hubungan yang baik. Fungsi audit internal telah menjadi mekanisme penting untuk perusahaan governance dalam beberapa tahun terakhir (IIA 2005). Karena Audit Internal akan berguna dalam hal pengawasan kinerja agar sesuai dengan standar yang ada sehingga tindak manajemen laba dapat dicegah. Audit Internal menjadi pengawas aktivitas pertama sebelum Komite Audit dan Auditor Eksternal. Dengan adanya Audit Internal yang baik diharapkan perusahaan akan melakukan aktivitasnya dengan baik.

Dalam surveinya, Kalbers (1992) menyimpulkan bahwa 31% dari responden menyatakan bahwa auditor internal tidak memiliki pertemuan secara pribadi dengan Komite Audit. Selain itu, Scarbrough et al. (1998) menemukan bahwa 24% dari perusahaan yang diwawancarai, audit internal tidak mempunyai akses ke komite audit. Namun, McHugh dan Raghunandan (1994) menghasilkan bahwa 65% dari perusahaan yang diwawancarai mengadakan pertemuan dengan Komite Audit.

Menurut Raghunandan et al. (2001), dalam surveinya terhadap 114 kepala auditor internal, menunjukkan bahwa hanya dengan independensi direktur dan setidaknya satu direktur dengan pengetahuan akuntansi, lebih memungkinkan adanya pertemuan dengan kepala departemen Audit Internal. Scarbrough et al. (1998) dalam penelitiannya yang dilakukan di Kanada terhadap 72 kepala auditor internal, menunjukkan bahwa komite audit yang terdiri dari direktur independen lebih cenderung untuk melakukan pertemuan dengan auditor internal.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan kerja yang kuat antara Komite Audit dengan Auditor Internal, maka akan dapat meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Hal ini mengarah ke Hipotesis sebagai berikut:

H4 Keberadaan Audit Internal berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba

H5 Pertemuan antara audit internal dengan komite audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba

2.4.3 Pengaruh Audit Eksternal terhadap Manajemen Laba

Dalam PMK No. 17/PMK.01/2008 dijelaskan, Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Menurut Undang-Undang Republika Indonesia No. 5 Tahun 2011, Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini. Pemerintah Republik Indonesia melalui

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 mengakui Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia. Becker et al, 1998 dan Francis et al, 1999 menemukan bahwa auditor *BIG N* menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi daripada auditor *Non-BIG N*, karena *BIG N* auditor memiliki insentif yang lebih besar untuk menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi daripada *NON-BIG N*. Francis (1999) memberikan bukti bahwa auditor *BIG N* menyediakan kualitas audit yang lebih tinggi dalam yurisdiksi litigasi tinggi tetapi tidak dalam yurisdiksi litigasi rendah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H6 Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba

Penelitian ini tidak hanya meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial saja melainkan meneliti secara simultan atau bersama - sama. Uji simultan digunakan untuk membandingkan model statistik yang telah diringkas menjadi data untuk mengidentifikasi model terbaik yang sesuai dengan populasi dari data. Sesuai dengan penjelasan, hipotesis penelitian ini adalah:

H7 Ukuran Komite Audit, Komite Audit Independen, Jumlah Rapat Komite Audit, Keberadaan Audit Internal, Pertemuan antara Audit Internal dengan Komite Audit, Ukuran KAP berpengaruh terhadap Manajemen Laba

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian dibagi menjadi beberapa bagian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. bagian tersebut masing-masing diuraikan sebagai berikut.

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Manajemen Laba, variabel bebas (*independent variable*) yaitu Komite Audit Independen, Ukuran Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Audit Internal, Pertemuan Audit Internal dan Komite Audit, Ukuran KAP dan variabel kontrol (*control variable*) yaitu Jumlah Aset, Leverage, Kerugian, dan ZMIJEWSKI Financial Score (X-Score).

Tabel 3.1

Variabel, Dimensi, Indikator dan Skala Pengukuran

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Manajemen Laba (Y)	Modified Jones Model	$DA_{t} : (TAC_{t} / A_{t-1}) - \alpha_1(1 / A_{t-1}) + \alpha_2((\Delta REV_{t} - \Delta RE_{t}) / A_{t-1}) + \alpha_3(PPE_{t} / A_{t-1})$	Rasio
Ukuran Komite Audit (X1)	Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000	Jumlah anggota komite audit	Rasio
Komite Audit Independen (X2)	Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000	Menggunakan variabel dummy, 1 jika independen dan 0 sebaliknya	Nominal
Jumlah Rapat	Surat Edaran	Jumlah rapat dalam satu tahun	Rasio

Komite Audit (X3)	Bapepam No. SE-03/PM/2000		
Audit Internal (X4)	Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000	Menggunakan variabel dummy, 1 jika terdapat audit internal dan 0 sebaliknya	Nominal
Pertemuan Audit Internal dengan Komite Audit (X5)	Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000	Menggunakan variabel dummy, 1 jika terjadi pertemuan dan 0 sebaliknya	Nominal
Ukuran KAP (X6)	Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000	Menggunakan variabel dummy, 1 jika diaudit oleh Big-4 dan 0 sebaliknya	Nominal

a. Variabel Dependen

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang terikat dan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Melalui analisis terhadap variabel terikat adalah mungkin untuk menemukan jawaban atas suatu masalah (Sekaran, 2006). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba. Proksi yang digunakan adalah Jonnes Modified.

1. Manajemen Laba

Copeland (1968) mendefinisikan manajemen laba sebagai, “*some ability to increase or decrease reported net income at will*”. Ini berarti bahwa manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimalkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajer. Dalam mengukur manajemen laba menggunakan *discretionary accrual* (DAC). Dalam penelitian ini *discretionary accrual* digunakan sebagai proksi karena merupakan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer. *Discretionary accrual* menggunakan komponen akrual dalam mengatur laba karena komponen akrual tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga dalam memainkan komponen akrual tidak disertai kas yang diterima/dikeluarkan. Untuk mengukur DAC, terlebih dahulu akan mengukur total akrual. Total akrual diklasifikasikan menjadi komponen *discretionary* dan *nondiscretionary*, dengan tahapan:

- a. Mengukur *total accrual* dengan menggunakan model Modified Jones Model oleh Dechow.

$$\text{Total Accrual (TAC)} = \text{NI} - \text{CFO}$$

Dimana

NI : laba bersih setelah pajak (*net income*)

CFO : arus kas operasi (*cash flow from operating*)

- b. Menghitung nilai accruals yang diestimasi dengan persamaan regresi

OLS (*Ordinary Least Square*):

$$\frac{TAC_t}{A_{t-1}} = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_t - \Delta REC_t}{A_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_t}{A_{t-1}} \right) + e$$

Dimana

TAC_t : *total accruals* perusahaan i pada periode t

A_{t-1} : total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1

REV_t : perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

REC_t : perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPE_t : aktiva tetap (*gross property plant and equipment*) perusahaan tahun t

- c. Menghitung *nondiscretionary accruals* model (NDA) adalah sebagai berikut:

$$NDA_t = \alpha_1 \left(\frac{1}{A_{t-1}} \right) + \alpha_2 \left(\frac{\Delta REV_t - \Delta REC_t}{A_{t-1}} \right) + \alpha_3 \left(\frac{PPE_t}{A_{t-1}} \right)$$

Dimana

NDA_t : *nondiscretionary accruals* pada tahun t

α : *fitted coefficient* yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan *total accruals*

- d. Menghitung *discretionary accruals*

$$DAC_t = \left(\frac{TAC_t}{A_{t-1}} \right) - NDA_t$$

Dimana

DAC_t : *discretionary accruals* perusahaan i pada periode t

Dari hasil penghitungan menunjukkan hasil yang negatif. Oleh karena itu untuk menunjang proses penganalisisan di SPSS, digunakan transform “*Absolut*” untuk merubahnya ke positif. Perubahan ini dimaksudkan agar mampu lolos dari uji analisis.

b. Variabel Independen

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan Ukuran Komite Audit, Komite Audit Independen, Jumlah Rapat Komite Audit, Audit Internal, Pertemuan antara Audit Internal dan Komite Audit, dan Ukuran KAP sebagai variabel bebas.

1. Ukuran Komite Audit

Laporan dan keputusan mengenai Ukuran Komite Audit disebutkan dalam beberapa Undang – Undang dan peraturan. Cadbury Report (1992) merekomendasikan minimal tiga anggota pada komite audit. The Blue Ribbon Committee Report (1999) merekomendasikan minimal tiga anggota dan empat pertemuan dalam satu tahun untuk efektifitas Komite Audit. The Sarbanas-Oxley Act (2002) menetapkan minimal tiga anggota.

Berdasarkan Surat Edaran Bapepam Nomor. SE-03/PM/2000 menyatakan bahwa komite audit pada perusahaan publik Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen. Ukuran komite

audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota di dalam komite audit.

2. Komite Audit Independen

Untuk menjamin independensi, Bapepam (2004) menetapkan persyaratan bagi pihak-pihak yang menjadi anggota komite audit yaitu:

- a. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
- b. Bukan merupakan orang yang bekerja pada Emiten dan Perusahaan Publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
- e. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

Komite Audit Independen dilihat ketika terbentuk eksklusif oleh eksternal dan independen member. Merupakan variabel dummy dimana

ketika lebih dari 34% anggota Komite Audit itu Independen maka akan diberi nilai 1 dan 0 apabila sebaliknya.

3. Jumlah Rapat Komite Audit

Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan (KNKG, 2001). Jadi variabel frekuensi pertemuan komite audit diukur dari jumlah pertemuan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

4. Audit Internal

Pengertian audit internal menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam SPAP (Standar Pelaporan Akuntan Publik) adalah : “Suatu aktivitas penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas organisasi sebagai pemberi bantuan bagi manajemen” (1998 ; 322). Sedangkan menurut Brink Z. Victor dan Witt Herbert dalam bukunya “Modern Internal Auditing” mengemukakan bahwa “Audit Internal adalah fungsi penilai independen yang dibentuk dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan sebagai layanan untuk organisasi” (199;1-1).

Dalam melaksanakan fungsinya, Aditor Internal melakukan penyelidikan dan meneliti keefektifan aktivitas perusahaan. Dengan pelaksanaan tersebut maka akan dapat diketahui apakah berbagai departemen yang ada melaksanakan fungsinya dengan baik atau tidak. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Audit Internal menjadi suatu alat

pengawasan yang penting dalam mengukur dan menilai keefektifan aktivitas yang ada dalam perusahaan.

Sama halnya dengan independensi komite audit, keberadaan audit internal juga merupakan variabel dummy dimana ketika terdapat audit internal dalam perusahaan maka akan diberi nilai 1 dan 0 jika sebaliknya.

5. Pertemuan Audit Internal dan Komite Audit

Dalam surveinya, Kalbers (1992) menyimpulkan bahwa 31% dari responden menyatakan bahwa auditor internal tidak memiliki pertemuan secara pribadi dengan Komite Audit. Selain itu, Scarbrough et al. (1998) menemukan bahwa 24% dari perusahaan yang diwawancarai, audit internal tidak mempunyai akses ke komite audit. Namun, McHugh dan Raghunandan (1994) menghasilkan bahwa 65% dari perusahaan yang diwawancarai mengadakan pertemuan dengan Komite Audit. Pertemuan ini diukur melalui variabel dummy dimana apabila terdapat pertemuan antara audit internal dengan komite audit maka dinilai 1 dan 0 untuk sebaliknya.

6. Ukuran KAP

Ukuran KAP dilihat dari besar kecilnya perusahaan audit. Sedangkan besar kecilnya KAP dilihat dari tergabungnya di *The Big Four* atau *Non Big Four*. Kantor akuntan publik besar ini sering disebut dengan *the big four*. *BIG 4* untuk KAP besar dan *Non BIG 4* untuk KAP kecil. Auditor yang termasuk *BIG 4* memiliki kualitas audit yang lebih tinggi karena fokus pada perlindungan reputasi nama. Selain itu, perusahaan

yang menggunakan jasa KAP *BIG 4* cenderung lebih dipercaya bila dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Non BIG*

4. Kategori KAP *BIG 4* di Indonesia yaitu :

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Drs.Haryanto Sahari & Rekan , KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama dengan KAP Sidharta-Sidharta dan Widjaja.
3. KAP Ernets dan Young, yang bekerjasama dengan KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja.
4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan KAP Drs.Hans Tuanokata & Mustofa, Osman Bing Satrio & Rekan.

Pada penelitian ini ukuran perusahaan audit menggunakan variabel *dummy*, nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh *BIG 4* Auditor dan 0 jika lainnya.

c. Variabel Kontrol

1. Jumlah Aset

Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit. Bagi manajemen, di dalam membaca neraca, nilai aset perlu dicermati karena menjadi dasar pengukuran prestasi keuangan perusahaan. Ukuran dari aset yaitu dengan melihat total asetnya.

Hasil pengukuran menunjukkan angka yang terlalu banyak. Hal ini mengganggu dalam penganalisisan di SPSS. Oleh karena itu di transform dengan “*ln*” untuk memperkecil angka.

2. Leverage

Leverage yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Financial Leverage. Financial Leverage menurut Lukman Syamsuddin, dalam bukunya Manajemen Keuangan Perusahaan (2001:113) menjelaskan Financial Leverage adalah :

“Sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan kewajiban-kewajiban finansial yang sifatnya tetap untuk memperbesar pengaruh perubahan EBIT terhadap pendapatan per lembar saham biasa (Earning Per Share)”.

Menurut Syafrudin Alwi (2001:301) “Financial Leverage merupakan perbandingan total hutang dengan seluruh dana atau aktiva dalam perusahaan yang disebut leverage factor”. Untuk mengukur leverage yaitu dengan membagi total hutang dengan total aset.

Hasil pengukuran menunjukkan desimal yang terlalu banyak. Diperlukan transform “*ln*” untuk mempersingkat desimal. Hasil yang diperoleh adalah negatif. Oleh karena itu digunakan transform “*absolut*” untuk merubah ke positif.

3. ZMIJEWSKI FINANCIAL SCORE

Zmijewski (1983) melakukan penelitian dengan memprediksi kebangkrutan perusahaan melalui validitas rasio keuangan. Rasio keuangan yang dianalisis adalah rasio-rasio keuangan yang terdapat pada model Zmijewski yaitu:

$$X_1 = \frac{EAT}{Total\ Aset}$$

$$X_2 = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Aset}$$

$$X_3 = \frac{Aset\ Lancar}{Hutang\ Lancar}$$

X_1 = Return On Asset atau Return On Investment

X_2 = Leverage

X_3 = Liquidity

$$ZFS = -4,336 - 4,513 (ROA) + 5,679 (\text{leverage}) + 0,004 (\text{Liquidity})$$

Hasil pengukuran menunjukkan desimal yang terlalu banyak. Diperlukan transform “*ln*” untuk mempersingkat desimal. Hasil yang diperoleh adalah negatif. Oleh karena itu digunakan transform “*absolut*” untuk merubah ke positif.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011. Jumlah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI selama 2010-2011 adalah 41 perusahaan.

Dalam penelitian ini penentuan sampel akan dilakukan melalui metode *random sampling*. Dalam penelitian ini, penentuan ukuran sampel dilakukan dengan menggunakan formula Babbie (1983, dalam Rizal, 2001):

$$n = \frac{N.pq}{(N-1)\frac{B^2}{4} + pq}$$

Dimana:

n = jumlah sampel yang diinginkan

N = jumlah populasi

p = probable value = 0,5 (untuk meminimalkan risiko sampling)

$q = 1-p = 0,5$

B = Bound of error atau kelonggaran kesalahan diperkirakan *berinterval*

range tidak lebih dari 10%

$$n = \frac{41(0,5,0,5)}{40.0,0025+(0,5,0,5)}$$

$n = 29,28 = 29$ perusahaan

sampel = 29 dikali 2 tahun = 58

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari pojok BEI UNDIP. Data tersebut berupa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan publik (non-perbankan) yang terdaftar di Bursa Efek.

Laporan tahunan berisi informasi keuangan dan informasi non keuangan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kondisi perusahaan jika dilihat dari sisi keuangan dan non keuangan (berdasarkan kinerja). Kinerja perusahaan diidentifikasi dengan baik untuk memastikan perbandingan yang wajar antara perusahaan dengan kesulitan keuangan dengan perusahaan yang sehat secara keuangan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dengan data dokumentasi. Dokumentasi adalah penelitian arsip yang memuat kejadian masa lalu (Indriantoro dan Supomo, 1999: 146). Pengumpulan data dokumentasi

dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku, koran, majalah dan sebagainya.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran analisis statistik deskriptif suatu data (Ghozali, 2011). Deskripsi atau gambaran data tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, minimum, sum, range kurtosis, skewness (kemencengan distribusi) dan nilai deviasi standar.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Mengingat data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menguji ketepatan model perlu dilakukan suatu pengujian dan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif maka model yang digunakan tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi. Dengan dilakukannya pengujian ini maka diharapkan agar model regresi yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel-variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2006). Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal serta melihat *normal probability plot*

yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal yang membentuk garis diagonal.

Dasar pengambilan keputusan dalam melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik *normal probability plot* (Ghozali : 2006) adalah :

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas lainnya yang digunakan adalah uji kolmogorov-smirnov. Menurut Imam Ghozali (2005), bahwa distribusi data dapat dilihat dengan membandingkan Z hitung dengan tabel Z tabel dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas (kolmogorov Smirnov) $>$ taraf signifikansi 5 % (0,05), maka distribusi data dikatakan normal .
- b. Jika nilai probabilitas (kolmogorov Smirnov) $<$ taraf signifikansi 5 % (0,05), maka distribusi data dikatakan tidak normal.

3.5.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2006). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Adanya

Multikolinieritas dalam model persamaan regresi yang digunakan akan mengakibatkan ketidakpastian estimasi, sehingga mengarah pada kesimpulan yang menerima hipotesis nol.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi (Ghozali, 2006) yaitu:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen tidak mempengaruhi signifikan variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variable independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (lebih dari 0,09), maka merupakan indikasi adanya multikolinieritas.
- c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan variance inflationfactor (VIF), suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolinieritas apabila mempunyai nilai toleransi $\leq 0,1$ dan nilai VIF ≥ 10 .

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi (Ghozali, 2006). Jika variabel dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau yang tidak terjadi Heteroskedastisitas. Pada heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak random (acak) tetapi

menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel.

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan grafik *Scatterplot*. Apabila nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5 persen dan grafik *Scatterplot*, titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. Selain dapat dideteksi dengan menggunakan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (Ghozali, 2005). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Dalam penelitian ini, uji yang digunakan ada atau tidaknya autokorelasi Run test. Runttest sebagai bagian dari statistik non parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Jika hasil tes menunjukkan tingkat signifikansi di atas 0,05 maka antar residual tidak terdapat

hubungan korelasi sehingga dapat dikatakan bahwa residual adalah acak atau random (tidak terdapat autokorelasi) (Ghozali, 2007).

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk menguji kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, selain itu untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen (Ghozali, 2006). Analisis regresi berganda yang dikembangkan untuk mencari pengaruh corporate governance terhadap struktur modal dengan menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS).

Persamaan regresinya yaitu:

$$EM_{it} = \beta_0 + \beta_1 MEMBERSAC + \beta_2 INDPAC + \beta_3 MEETSAC + \beta_4 IA + \beta_5 MEETINGSACIA + \beta_6 FS + \beta_7 TA + \beta_8 LEVERAGE + \beta_9 ZFS + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

EM_{it}	= Manajemen Laba
MEMBERSAC	= Ukuran Komite Audit
INDPAC	= Komite Audit Independen
MEETSAC	= Jumlah Pertemuan Komite Audit
IA	= Audit Internal

MEETINGSACIA Internal	= Pertemuan Komite Audit dengan Audit Internal
FS	= Firm Size
TA	= Total Aset
LEVERAGE	= Leverage
ZFS	= ZMIJEWSKI Financial Score
β	= Parameter koefisien variabel independen
ε_{it}	= Error Term

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2006) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2006) uji stastistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan ketiga variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan ketiga variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

Pada data time series biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang cukup tinggi. Adapun kelemahannya yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 akan meningkat tanpa peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu digunakan nilai adjusted R^2 , karena tambahan variabel independen dalam model dapat berpengaruh naik atau turun.